PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SRAGEN
ASKARA BUMI SUKOWATI
NYAWIJI MELAYANI BUMI SUKOWATI

RENCANA AKSI
TAHUN 2023



DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

RENCANA AKSI

TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tahun 2023

DAFTAR ISI

			Hal
HALAMAN JUDUL			ii
DAFTAR ISI			iii
BAB I.	PENDAHULUAN		1
	1	Latar Belakang	1
	2	Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	2
	3	Maksud dan Tujuan	4
	4	Landasan Hukum	4
BAB II.	RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA		6
	1	Ikhtisar perjanjian Kinerja Tahun 2023	6
	2	Rencana Aksi Tahun 2023	12
BAB III.	PENUTUP		19

BAB I

PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat, sehingga kualitas penyusunan Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu, dan Renstra yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Kerja Tahunan, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahunan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;

c. Penyusunan Rencana Aksi bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Aksi dengan dokumen RKPD dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Aksi merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra dan RKPD. Rencana Aksi merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, dasar penyusunan RKA-DPA dan RAPBD.

2) TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

a. Tugas

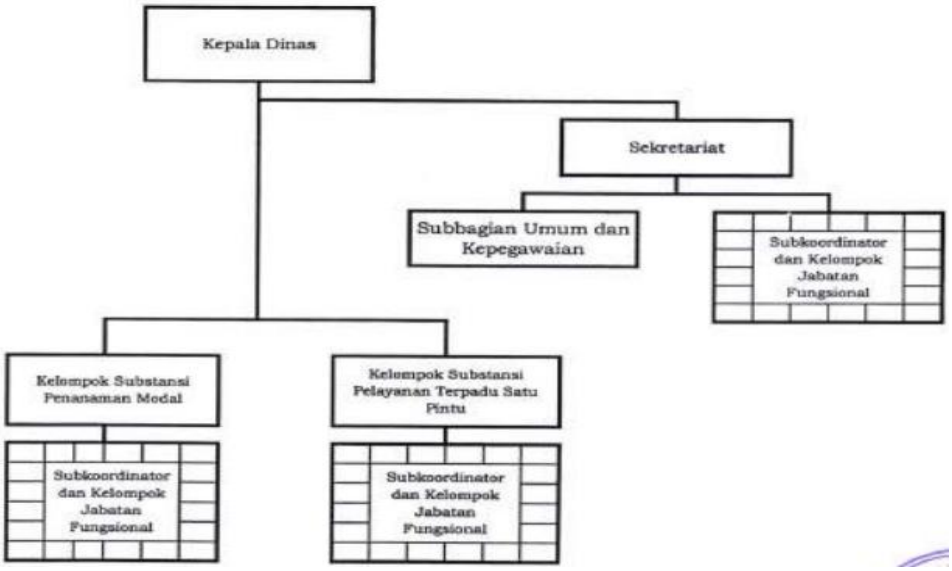
1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

c. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



d. Sumber Daya Manusia

TABEL 1.1
JUMLAH ASN BERDASAR GOLONGAN

Golongan / Ruang	Esselon				Staf	Jumlah
	II	III	IV			
Golongan IV/c	1					
Golongan IV/b		1		2		
Golongan IV/a			1			
Jumlah Golongan IV	1	1	1	2	0	5
Golongan III/d				8	7	
Golongan III/c				1		
Golongan III/b						
Golongan III/a					3	
Jumlah Golongan III	0	0	0	9	10	19
Golongan II/d						
Golongan II/c						
Golongan II/b						
Golongan II/a					1	
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	1	1
Golongan I/d						
Golongan I/c						
Golongan I/b						
Golongan I/a						
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0
Total	1	1	1	11	11	25

Sumber Data : DPMPTSP Tahun 2022

TABEL 1.2

JUMLAH ASN BERDASAR PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	DOKTOR (S3)	-
2	PASCASARJANA (S2)	5
3	SARJANA (S1)	19
4	SARJANA MUDA (D3)	1
5	SLTA / SMEA / MA	0
6	SLTP	0
7	SD	0
JUMLAH		**25**

Sumber data : DPMPTSP Tahun 2022

3). MAKSUD DAN TUJUAN

a) Maksud dari Rencana Aksi Tahun 2023 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

b) Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana aksi ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

4). LANDASAN HUKUM

a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan ;

d) Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

BAB II

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

1) IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja terhadap target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen berdasarkan tujuan/ sasaran strategis jangka menengah serta dengan telah disahkannya Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Maka Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)	TARGET					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**TUJUAN** : Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)	**Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah . **Formulasi Pengukuran:** Nilai investasi dalam tahun berjalan. **Tipe Perhitungan:** Komulatif **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	8,00
1.1	**SASARAN** : Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	**Alasan Pemilihan Indikator:** Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan iklim usaha yang berdaya saing dan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha, yang mendukung peningkatan jumlah PMA/ PMDN (investor). **Formulasi Pengukuran:** Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/ investor) dalam tahun berjalan. **Tipe Perhitungan:** Komulatif **Sumber Data:** Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal	1.250	1.313	1.378	1.447	1.519	6.907

Dari indikator kinerja utama tersebut diperjanjikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dengan Bupati Sragen sebagai pemberi mandat dalam bentuk Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	1,550	trilyun rupiah
2	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	1.313	investor
3	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB (70,30)	predikat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	5.364.340.708	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	211.237.000	DAU
3	Program Promosi Penanaman Modal	141.240.500	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	507.849.000	DAU
5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan	386.00.000	DAK NON FISIK

6	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.392.000	DAU
	JUMLAH	6.719.059.208	

Untuk dapat merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target pada rencana kinerja tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PElayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, maka terdapat 5 (lima) Program yang mendukung sasaran strategis/IKU dan 1 (satu) Program yang mendukung sasaran penunjang/ kinerja penunjang.

a. Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung IKU antara lain:

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Keterangan
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**40%**	
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	2	
18.02.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	
18.02.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [Dokumen]	2	
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**20%**	
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	2	
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	2	
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**83,00**	
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100%	
18.04.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	1.200	

18.04.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	500	
18.04.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]	93	
18.04.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	150	
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**10%**	
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100%	
18.05.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	60	
18.05.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal [Pelaku Usaha]	315	
18.05.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	100	
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**40%**	
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	40%	
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	1	

b. Program yang mendukung kinerja penunjang:

Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Keterangan
18	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	100	

18	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun (dokumen)	3	
18	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	1	
18	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	12	
18	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	25	
18	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [dokumen]	1	
18	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut [Paket]	34	
18	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	
18	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	12	
18	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	4	
18	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	6	
18	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	4	
18	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	3	
18	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	1	
18	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	25	
18	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	1	
18	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1	

					Elektronik pada SKPD (dokumen)		
18	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	2	
18	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	
18	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	4	
18	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [unit]	5	
18	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12	
18	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	4	
18	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	4	
18	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	4	
18	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	4	
18	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	12	
18	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	3	
18	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	12	
18	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	56	
18	1	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3	
18	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	
18	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	31	

2) RENCANA AKSI TAHUN 2023

Secara rinci Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah Nilai investasi	trilyun rupiah	1,55	6.719.059.208	0,4	0,8	1,2	1,55	Kepala Dinas
1.1	**Sasaran Strategis :** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	investor	1.313		300	600	1.000	1.313	Kepala Dinas
18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun**	**%**	40	211.237.000	0	0	20	40	Kepala Dinas
18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan peta potensi investasi	dokumen	2	211.237.000	0	0	1	2	Koord Penanaman Modal
18.02.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	1	88.839.000	0	0	1	1	Subkor Pengembangan
18.02.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	dokumen	1	122.398.000	0	0	0	1	Subkor Pengembangan
18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/ besar**	**%**	20	141.240.500	2	8	15	20	Kepala Dinas
18.03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi	jumlah even promosi	kali	2	141.240.500	0	0	1	2	Koord Penanaman Modal

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	141.240.500	0	0	1	2	Subkor Promosi
18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan**	Poin	83,00	507.849.000	0	83	83	83	Kepala Dinas
18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	%	100	507.849.000	100	100	100	100	Koord PTSP
18.04.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1200	131.252.000	300	600	900	1200	Subkor Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
18.04.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	500	216.033.000	100	250	350	500	Subkor Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan
18.04.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	93	63.487.000	20	50	70	93	Subkor Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan

18.04.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	150	97.077.000	0	150	150	150	Subkor Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**%**	10	386.000.000	2	5	7	10	Kepala Dinas
18.05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	**%**	100	386.000.000	100	100	100	100	Koord Penanaman Modal
18.05.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan USaha	60	54.000.000	15	30	45	60	Subkor Pengendalian dan PElaksanaan
18.05.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	315	238.000.000	121	242	300	315	Subkor Pengendalian dan PElaksanaan
18.05.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	100	94.000.000	25	50	75	100	Subkor Pengendalian dan PElaksanaan
18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik**	%	40	108.392.000	0	0	0	40	Kepala Dinas
18.06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan	%	40	108.392.000	0	0	0	40	Koord PTSP
18.06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Dokumen	1	108.392.000	0	0	0	1	Subkor Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

	Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan								
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	predikat	70,30	5.364.340.708	0	70,30	70,30	70,30	Kepala Dinas
18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	%	100	5.364.340.708	25	50	75	100	Kepala Dinas
18.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	3	3.783.000	1	2	3	3	Sekretaris
18.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	3.783.000	1	1	1	1	Subkor PEP
18.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	3.190.649.009	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25	3.190.649.009	25	25	25	25	Sunbkor Keuangan
18.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	dokumen	1	76.900.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	paket	34	30.685.000	34	34	34	34	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	orang	40	46.215.000	0	40	40	40	Kasubag Umum dan Kepegawaian

	Peraturan Perundang-Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
18.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	550.920.000	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	42.108.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	219.230.000	1	2	3	6	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	64.350.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	111.615.000	1	1	2	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	7.992.000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	25	75.000.000	6	12	18	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	15.600.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	15.025.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	laporan	2	192.261.000	1	1	2	2	Sekretaris

18.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	33.815.000	1	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	99.237.000	3	4	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [unit]	unit	5	59.109.000	3	5	5	5	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	1.053.781.000	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	5.500.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	471.272.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	105.978.298	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	488.673.000	1	2	3	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	laporan	12	278.404.401	3	6	9	12	Sekretaris
18.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	54.150.000	3	3	3	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	unit	12	111.217.000	12	12	12	12	Kasubag Umum dan Kepegawaian

		dan dibayarkan Pajaknya]								
18.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	56	18.521.000	12	24	48	56	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	3	20.850.000	1	2	3	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	34.915.000	0	1	1	1	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	31	38.751.401	8	16	24	31	Kasubag Umum dan Kepegawaian

BAB III
PENUTUP

Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Rencana Aksi disusun dengan mempedomani Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan.

Rencana Aksi ini secara umum menguraikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub-kegiatan serta indikator dan target kinerja. Maka dengan mempedomani Rencana Kerja Tahunan ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD, diharapkan tugas fungsi dinas dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja prangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati Sragen. Yang terpenting bahwa Rencana Aksi ini akan dapat tercapai dengan komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan staf yang disertai

pengabdian dan loyalitas yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Demikianlah dokumen Rencana Aksi untuk periode tahun 2023 ini yang disusun sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Sragen, 3 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

ttd

TUGIYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19670708 199303 1 010